



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 959-966

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Determinan Pengelolaan Dana Sarana dan Prasarana Kelurahan: Peran Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Yudi Rahman, Fakhri, Hardika Muhammad Fatih, Nurahmah

STIE Pancasetia

[yudirahman877@gmail.com](mailto:yudirahman877@gmail.com), [fakhriezidane@gmail.com](mailto:fakhriezidane@gmail.com), [hardikamf@gmail.com](mailto:hardikamf@gmail.com)

### Abstrak

*Pengelolaan dana sarana dan prasarana di tingkat kelurahan merupakan instrumen krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan di wilayah Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Urgensi penelitian ini berangkat dari fenomena pentingnya penerapan prinsip good governance dalam memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan (explanatory research). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di berbagai kelurahan di Kecamatan Murung Pudak dengan jumlah total 52 orang. Mengingat populasi yang terbatas, peneliti menerapkan teknik total sampling atau sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian untuk mendapatkan gambaran data yang akurat dan representatif. Instrumen utama pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur yang diukur menggunakan skala Likert. Data yang terkumpul kemudian diuji melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Disarankan bagi pemerintah kelurahan di Kecamatan Murung Pudak untuk terus memperkuat sistem keterbukaan informasi serta mengoptimalkan fungsi pengawasan internal. Peningkatan kapasitas ASN dalam hal pelaporan keuangan yang akuntabel sangat diperlukan agar pengelolaan dana ke depannya menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan sarana fisik di masyarakat.*

*Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Pengelolaan Dana, Kelurahan.*

### 1. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Halim (2018), keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan serta mengelola belanja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menuntut adanya tata kelola yang baik (good governance) yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan (Mardiasmo, 2018). Namun demikian, fenomena empiris di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa meskipun total anggaran sarana dan prasarana kelurahan tahun 2025 mencapai Rp3,04 miliar dan telah dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar. Pertama, dari aspek akuntabilitas, pelaporan kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis outcome, sehingga belum mampu menggambarkan keberhasilan program secara komprehensif. Hal ini bertentangan dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Kedua, dari aspek transparansi, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih terbatas, khususnya terkait rincian penggunaan anggaran dan hasil kegiatan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya implementasi teori transparansi yang menekankan akses informasi publik secara terbuka dan tepat waktu (Krina, 2003). Ketiga, dari aspek pengawasan, masih ditemukan lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring. Menurut Siagian

---

Determinan Pengelolaan Dana Sarana dan Prasarana Kelurahan: Peran Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

(2014), pengawasan yang efektif merupakan kunci dalam mencegah penyimpangan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Secara teoritis, hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan melalui teori *good governance* dan *agency theory*. Dalam perspektif *agency theory*, pemerintah bertindak sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan menjadi instrumen penting dalam meminimalkan asimetri informasi dan potensi penyimpangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Hermansyah et al. (2018) dan Mulkhadimah (2022) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik. Sementara itu, Kushartiningsih (2021) menyatakan bahwa transparansi dan pengawasan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi variabel-variabel tersebut belum konsisten dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. *Research gap* dalam penelitian ini terletak pada adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat pemerintah daerah atau OPD, sehingga kajian spesifik pada pengelolaan dana sarana dan prasarana di tingkat kelurahan masih terbatas. Kajian yang menjadikan kecamatan sebagai unit analisis juga relatif minim, khususnya di Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih spesifik dan kontekstual terkait peran akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan dana kelurahan.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Akuntansi Keuangan Publik**

Keuangan publik atau keuangan negara merupakan seluruh aktivitas finansial pemerintah yang mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa penerimaan, pengeluaran, maupun pengelolaan kekayaan negara dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang dikuasai pemerintah.

Menurut CST Kansil (2017) dan Tjandra (2019), keuangan publik tidak hanya mencakup aspek anggaran, tetapi juga pembiayaan yang berkaitan dengan utang dan piutang negara serta rencana keuangan pemerintah dalam satu periode anggaran. Pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dari empat pendekatan, yaitu obyek, subyek, proses, dan tujuan, yang semuanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya negara untuk kepentingan publik.

### **2.2 Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah atau pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2018), Halim (2018), dan Mahmudi (2019), akuntabilitas mencakup proses pelaporan, pengungkapan, serta pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang berhak menerima informasi tersebut. Akuntabilitas publik memiliki beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Kelima dimensi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga proses, kebijakan, serta hasil program yang dijalankan pemerintah. Selain itu, akuntabilitas dibedakan menjadi akuntabilitas vertikal yang bersifat hierarkis kepada atasan, serta akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas melalui beberapa tahapan seperti pelaporan, pencarian informasi, penilaian, serta pengendalian oleh publik. Indikator utama akuntabilitas mencakup kejujuran, kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas program, serta pertanggungjawaban kebijakan dan keuangan yang diambil pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

### **2.3 Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya publik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2018), Agoes dan Ardana (2019), serta Renyowijoyo

(2019), transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaporan keuangan pemerintah. Transparansi juga menjadi salah satu prinsip *good governance* yang bertujuan membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip transparansi menekankan akses informasi yang mudah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi juga mencakup mekanisme pengaduan, keterbukaan informasi publik, serta kerja sama dengan media dan lembaga pengawas. Indikator transparansi meliputi penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, serta peningkatan arus informasi melalui media dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel

## **2.4 Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses manajerial yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Menurut berbagai ahli seperti Siagian (2017), Mangkunegara (2017), dan Robbins & Coulter, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai upaya menjamin efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Proses pengawasan mencakup kegiatan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi kesalahan atau hambatan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Indikator pengawasan menurut Robbins & Coulter meliputi penetapan standar, pengukuran, perbandingan hasil, dan tindakan korektif.

## **2.5 Pengelolaan Dana Sarana dan Prasarana Kelurahan**

Kelurahan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari camat. Berdasarkan regulasi seperti PP No. 17 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan bersumber dari dana perimbangan APBN dan APBD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana kelurahan bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan kelurahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Pengelolaan keuangan kelurahan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Lurah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan yang dibantu oleh perangkat teknis dalam pelaksanaannya. Indikator pengelolaan keuangan kelurahan meliputi perencanaan melalui musyawarah, pelaksanaan sesuai APB, penatausahaan secara sistematis oleh bendahara, serta pertanggungjawaban melalui pelaporan realisasi anggaran kepada pemerintah daerah

## **3. Metode Penelitian**

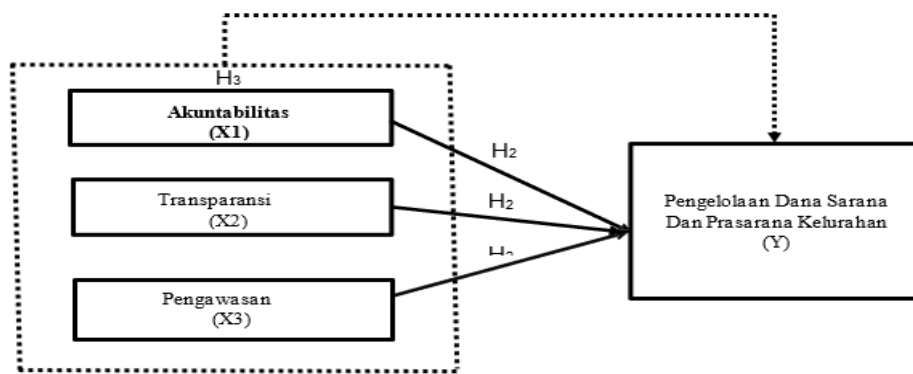
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran data secara numerik melalui survei atau kuesioner. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif, terstruktur, dan dapat digeneralisasi. Data dikumpulkan menggunakan instrumen angket, kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan (X3) terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y) di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong berdasarkan teori yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berbentuk angka serta data kualitatif sebagai pendukung berupa deskripsi. Data kuantitatif digunakan untuk analisis statistik, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman hasil penelitian. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden ASN di kelurahan Kecamatan Murung Pudak, serta data sekunder yang berasal dari dokumen, profil kecamatan, struktur organisasi, dan data pendukung lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN pada kelurahan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang berjumlah 52 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka digunakan teknik total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur, jurnal, dan referensi terkait penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan uji variabel dominan. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui teknik observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner (Ibrahim, 2019:69). Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, arsip, serta laporan yang tersedia pada Dinas KP3H Kabupaten Tabalong (Bungin, 2018:122).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

#### 4. Hasil dan Diskusi

##### 4.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), pengawasan (X3), dan pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $r$  hitung seluruh item yang lebih besar dari  $r$  tabel (0,2732) serta nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Rentang $r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	16	0,415 – 0,852	0,2732	Valid seluruh item
Transparansi (X2)	16	0,585 – 0,866	0,2732	Valid seluruh item
Pengawasan (X3)	16	0,323 – 0,794	0,2732	Valid seluruh item
Pengelolaan Dana (Y)	16	0,334 – 0,696	0,2732	Valid seluruh item

Sumber: Data Diolah 2026

##### 4.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Pengukuran reabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Reliabilitas suatu konstruk dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach's alpha*  $> 0,60$ .

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,884	Reliabel
Transparansi (X2)	0,936	Reliabel
Pengawasan (X3)	0,847	Reliabel
Pengelolaan Dana (Y)	0,801	Reliabel

Sumber: Data Diolah 2026

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil tersebut, digunakan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), pengawasan (X3), dan pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y) berdistribusi normal.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Berdasarkan hasil scatterplot, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

##### 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil analisis menunjukkan nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, yaitu akuntabilitas (tolerance 0,233; VIF 4,286), transparansi (0,499; VIF 2,004), dan pengawasan (0,243; VIF 4,119).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, sehingga model regresi memenuhi asumsi dasar dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

##### 4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan (X3) terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y) di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 26 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Analisis Regresi Berganda**

Variabel	B	Std. Error
Konstanta	9,014	5,062
Akuntabilitas (X1)	0,380	0,161
Transparansi (X2)	0,529	0,290
Pengawasan (X3)	0,349	0,160

Sumber : Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,014 + 0,380X1 + 0,529X2 + 0,349X3$$

Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan secara sederhana bahwa nilai konstanta sebesar 9,014 menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan adalah sebesar 9,014.

Selanjutnya, koefisien akuntabilitas (0,380) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan dana sebesar 0,380, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien transparansi (0,529) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan pengelolaan dana sebesar 0,529. Sementara itu, koefisien pengawasan (0,349) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengawasan akan meningkatkan pengelolaan dana sebesar 0,349, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

#### 4.4 Uji Hipotesis Penelitian

##### 1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan (X3) secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y). Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1607.928	3	535.976	31.193	0.000
Residual	824.7640	48	17.183		
Total	2432.692	51			

Sumber: Data Diolah 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana sarpras kelurahan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Murung Pudak.

##### 2. Uji t

**Tabel 5**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	9.014	5.062		1.781	0.031
Akuntabilitas (X1)	0.380	0.161	0.410	2.355	0.023
Transparansi (X2)	0.529	0.290	0.546	3.811	0.021
Pengawasan (X3)	0.349	0.166	0.359	2.103	0.041

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana sarpras dengan nilai sig  $0,023 < 0,05$  dan thitung  $2,355 > 2,01063$ , yang mengindikasikan bahwa semakin baik pertanggungjawaban yang dilakukan maka kualitas pengelolaan dana akan semakin meningkat. Hal yang sama ditemukan pada variabel Transparansi (X2) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan (sig  $0,021 < 0,05$  dan thitung  $3,811 > 2,01063$ ), di mana keterbukaan informasi terbukti mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran. Selain itu, variabel Pengawasan (X3) juga memberikan kontribusi positif dan signifikan (sig  $0,041 < 0,05$  dan thitung  $2,103 > 2,01063$ ) yang menegaskan bahwa kontrol yang efektif akan memperbaiki tata kelola dana sarpras; dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketiga variabel tersebut memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sarpras di tingkat kelurahan.

#### 4.5 Variabel Dominan

Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan dana sarpras kelurahan berdasarkan nilai Standardized Coefficient (Beta). Berdasarkan hasil tabel 5 diatas, variabel transparansi (X2) memiliki nilai beta tertinggi yaitu 0,546, sehingga merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai variabel dominan ditolak, dan sebaliknya transparansi menjadi faktor paling dominan dalam penelitian ini

Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa tata kelola dana sarana dan prasarana (sarpras) di Kelurahan Kecamatan Murung Pudak sangat bergantung pada tiga pilar utama: Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan. Melalui uji simultan (Uji F), ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dana. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan pada salah satu aspek saja tidaklah cukup; diperlukan integrasi yang solid antara pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan mekanisme kontrol untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat kelurahan. Hal ini selaras dengan prinsip good governance yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), di mana sinergi ketiga aspek tersebut akan menciptakan kepercayaan publik yang lebih kuat.

Secara parsial, Akuntabilitas (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana sarpras. Berdasarkan jawaban responden, praktik akuntabilitas di lokasi penelitian dinilai sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan secara periodik dan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran. Temuan ini mendukung teori Mahmudi (2019) dan sejalan dengan penelitian Syahputri (2023) yang menegaskan bahwa semakin tinggi tanggung jawab pemerintah dalam melaporkan kinerjanya, semakin tertib pula administrasi keuangan yang dihasilkan. Meski demikian, konsistensi dalam pelaporan tetap menjadi catatan penting untuk terus ditingkatkan.

Selanjutnya, variabel Transparansi (X2) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, bahkan tercatat sebagai variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kualitas pengelolaan dana sarpras. Hasil ini menggambarkan bahwa kemudahan akses informasi bagi masyarakat merupakan faktor strategis dalam mendorong partisipasi publik dan mencegah terjadinya korupsi. Dominasi transparansi dalam penelitian ini memperkuat studi Prasetya dan Putri (2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Ketika masyarakat dapat memantau aliran dana dengan mudah, maka akuntabilitas pemerintah kelurahan secara otomatis akan terjaga.

Di sisi lain, Pengawasan (X3) turut memberikan kontribusi positif yang signifikan. Keberadaan mekanisme kontrol, baik secara internal melalui evaluasi berkala maupun eksternal melalui pengawasan masyarakat, terbukti mampu memastikan penggunaan dana tetap berada pada koridor aturan yang berlaku. Meskipun secara empiris pengawasan sudah berjalan, penelitian ini mencatat perlunya penguatan fungsi preventif dan korektif agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arifin (2020) dan penelitian Rahmawati (2022), namun memberikan sudut pandang yang berbeda dari temuan Sugiharti (2021), yang menunjukkan adanya variasi efektivitas implementasi pengawasan di berbagai daerah.

Sebagai kesimpulan, pengelolaan dana sarpras di Kecamatan Murung Pudak harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Penguatan transparansi sebagai faktor dominan perlu didukung oleh sistem akuntabilitas yang akurat serta pengawasan yang berkelanjutan. Secara teoritis dan empiris, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, pemerintah kelurahan wajib meningkatkan komitmen pada pelaporan yang jujur, keterbukaan informasi publik, dan pemantauan yang ketat guna mewujudkan tata kelola keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Ketiga variabel tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Secara parsial, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan masing-masing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana. Akuntabilitas mendorong tertibnya pertanggungjawaban dan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Transparansi meningkatkan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan publik. Sementara itu, pengawasan berperan dalam memastikan penggunaan dana sesuai aturan serta meminimalkan potensi penyimpangan. Di antara ketiga variabel tersebut, transparansi merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menciptakan pengelolaan dana yang berkualitas, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah kelurahan disarankan untuk mengoptimalkan transparansi sebagai faktor dominan melalui penyediaan informasi keuangan yang terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan. Selain itu, akuntabilitas perlu diperkuat melalui penyusunan laporan yang konsisten dan sesuai standar, serta pengawasan harus ditingkatkan secara sistematis untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana

kelurahan, terutama melalui pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, standarisasi prosedur pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan dana di tingkat pemerintahan lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya model penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi jumlah sampel maupun wilayah penelitian, serta mempertimbangkan penggunaan metode campuran (mixed methods) agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakses informasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan, sehingga tercipta kontrol sosial yang efektif dan mendorong peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintah.

## Referensi

1. Afifah, N., & Fitria, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik di Samsat Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(8). Retrieved from (<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4756>)
2. Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik. 2019. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat.
3. Akdon, Ridwan. 2018. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung : Alfabeta
4. Arep, Ishak, dan Tanjung, H. 2018. *Manajemen Motivasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
5. CST, Kansil. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
6. Fatih, H. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja, Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1), 31-39.
7. Fatih, H. M. (2026). Peran Artificial Intelligence Support dalam Memediasi Pengaruh Kompetensi Digital terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 7878-7887.
8. Fatih, H. M. (2026). Pengaruh Digitalisasi Kerja dan Dukungan Teknologi terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Pengelola Rumah Susun Kota Banjarmasin. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2581-2593.
9. Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
10. Harlie, M. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid I*. Banjarmasin: Alhaka Publishing
11. Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21-29. Diterima dari (<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/711/460>)
12. Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba. Empat.
13. Kartono dan Kartini. 2017. *Pemimpin dan Kepemimpinan Cetakan ke-4*. Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada
14. Khoiriyah, N. dan Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kineja pegawai. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), pp. 1–17.
15. Krina. 2016. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Cetakan ke-7*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
16. Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : STIM YPKN
17. Maman Ukas, 2016. *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Cetakan keenam Edisi Revisi. Bandung : Aghini.
18. angkunegara, A. P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
19. Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
20. Mursyidi. 2018. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika.
21. Aditama
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006. Tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
25. Putra, H. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik*. Skripsi. Universitas Negeri Padang
26. Rahayu, Riany Depita (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan (Sensus Pada Kelurahan di Kecamatan Purbaru Kota Tasikmalaya Tahun 2021)*. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi
27. Renyowijoyo, Muindro. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Rivai, R. A. 2019. *Manajemen*. Palembang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
28. Robbins, S. P. 2017. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
29. edarmayanti. 2017. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
30. Simamora, H. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi I*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
31. Sondang, P. Siagian. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
32. Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
33. Sutrisno, E. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Swastha,
34. Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 2017. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta : Rineka Cipta
- 35.